

Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata Masa Pandemi Covid 19 di Ponorogo

Vol 5 Special Issue 3
(December, 2021)

Yusuf Vreda¹, Yusron Adhan², Deny Ahmad³, Ekapti Wahjuni DJ⁴

¹²³⁴ Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email: vredayusuf@gmail.com¹, yusronadhan08@gmail.com², denyahmad369@gmail.com³, ekaptiwahyuni@gmail.com^{4*}

ARTICLE INFO

Article history:

Received: xxx
Revised version received: xxx
Accepted: xxx
Available online: xxx

Keywords:

Government public relations;
Government policy; Ngebel Lake;
COVID-19 pandemic;

How to Cite:

APA Style 7th

ABSTRACT

The tourism industry has an important role in terms of national development. In addition, tourism also has an influence on Regional Original Revenue (PAD) for Local Governments. Ponorogo Regency is one of the areas in East Java which has a variety of tourist attractions. One of the leading tourist objects is Ngebel Lake. Telaga Ngebel has potential that needs to be developed. Therefore, a strategy is needed to develop Ngebel Lake in order to develop and increase interest in visiting. The COVID-19 pandemic is a cause of stability in the tourism sector because all tourism activities follow the Government's Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy with the aim of encouraging the spread of the pandemic. The role of governance is a variable or dynamic in society, providing good information to the community, bridging the community and the government, and being able to harmonize problems in society with public relations information well. This study aims to see the role of governance in the development of tourism during the COVID-19 pandemic in Ngebel Ponorogo Lake. The research method used is a qualitative descriptive approach with field studies. The results show that governance in policies to overcome and develop Ngebel Ponorogo Lake has been carried out by providing information about health protocols in tourism activities in Ngebel Ponorogo Lake. In addition, the government has mapped the socio-ecological relationship in the Ngebel Ponorogo Lake area and opened tourist attractions in a new normal era.

Available online at <https://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/IJGCS>
Copyright (c) 2021 by IJGCS



1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, budaya, maupun sumber daya manusianya. Kekayaan Indonesia yang melimpah dan menarik membuat wisatawan terpikat untuk mengunjungi daerah-daerah wisata di Indonesia. Pada umumnya masyarakat melakukan kegiatan pariwisata sebagai obat untuk rasa lelah dan penat ataupun untuk menikmati kekayaan alam Indonesia bersama orang terdekat. Kekayaan destinasi wisata yang dimiliki oleh Indonesia memang menarik untuk dikunjungi bagi wisatawan local maupun internasional. Telaga ngebel ponorogo memiliki banyak destinasi untuk dikunjungi, seperti air terjun (widodaren, selorejo), mloko sewu, ngebel adventure park, kampung durian, dan pemandian air hangat. Telaga Ngebel menjadi tempat wisata yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan tempat wisata lainnya yaitu sebagai sarana pendidikan, tempat penelitian, maupun sebagai tempat wisata. Dengan banyaknya wisatawan yang mengunjungi telaga ngebel ponorogo, maka fasilitas yang dibutuhkan akan semakin banyak pula, seperti penginapan, restoran, pemandu wisata, hingga toilet umum. Selain itu, telaga ngebel memiliki ciri khas buah nangka dan durian maupun berbagai makanan olahan akan banyak dicari oleh wisatawan.

Dengan adanya pandemi COVID-19 sudah dipastikan akan terjadi penurunan jumlah wisatawan yang mengunjungi telaga ngebel di tahun 2020, terutama kunjungan dari wisatawan luar

daerah. Dengan penurunan wisatawan tersebut, maka akan berpengaruh pada penurunan ekonomi termasuk di sektor pendukung pariwisata lainnya, seperti transportasi, penginapan dan hotel, restoran, serta semua pelaku usaha yang menggantungkan nasibnya pada sektor pariwisata di Telaga Ngebel. Pada akhirnya COVID-19 memaksa para pelaku usaha di sektor pariwisata mengurangi jumlah pekerjanya, serta membuat tingkat pendapatan daerah dan perekonomian ikut menurun.

Pandemi COVID-19 menjadi sebuah tantangan bagi sektor pariwisata untuk dapat berjalan ditengah pandemi dengan memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik wisatawan maupun masyarakat lokal di sekitar tempat wisata. Disinilah peran pemerintah dibutuhkan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat melindungi masyarakat dari pandemi COVID-19. Salah satu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah yaitu adanya protokol kesehatan yang wajib diikuti oleh seluruh masyarakat, seperti memakai masker, rutin mencuci tangan dengan sabun, memakai handsanitizer, serta menerapkan jaga jarak di tempat keramaian. Adapun kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk tempat wisata yaitu adanya tindakan pencegahan yang perlu dilakukan, seperti memperhatikan informasi terkini mengenai COVID-19, melakukan pembersihan dengan desinfektan secara berkala di tempat umum, menyediakan fasilitas untuk mencuci tangan, memaksimalkan sirkulasi udara, mengencarkan propaganda perlindungan diri dari COVID-19, seperti memakai masker, melakukan pemeriksaan suhu pada pengunjung, memastikan para pekerja di sektor pariwisata memahami perlindungan diri dari COVID-19, menyediakan pos kesehatan, menerapkan jaga jarak bagi pengunjung maupun pekerja, mengusahakan penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain sebagainya.

Peran pemerintah sangat menentukan suatu informasi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan timbal balik dari masyarakat pun dapat sampai kepada pemerintah. Dalam perannya, Pemerintah harus mengetahui peranannya sebagai komunikator yang baik untuk memberikan informasi kepada individu atau kelompok dan menerima informasi, serta aspirasi yang selanjutnya akan menjadi acuan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang sekiranya diperlukan oleh masyarakat.

Pada masa COVID-19, kebijakan pemerintah dalam melindungi masyarakatnya sangat diperlukan untuk mengurangi kekhawatiran ditengah masyarakat. Seluruh informasi dan kebijakan yang telah dirumuskan akan menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Selain itu, Pemerintah juga memiliki tanggung jawab terhadap informasi yang tidak benar dan berkewajiban untuk meluruskan informasi tersebut. pemerintah menjadi pihak terdepan dalam menghadapi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pesan maupun kebijakan-kebijakan, baik itu melalui media komunikasi maupun disampaikan secara langsung. Di tengah pandemi COVID-19 peran pemerintah sangat dibutuhkan, salah satunya dalam pengembangan pariwisata. Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat perlu disampaikan kepada masyarakat sehingga roda sektor pariwisata dapat berputar kembali dan tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka identifikasi masalahnya yaitu bagaimana peran Collaborative Governance dalam pengembangan pariwisata pada masa pandemi COVID-19 di telaga ngebel, Kabupaten ponorogo, Provinsi Jawa timur ?. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan peran peran Collaborative Governance dalam pengembangan pariwisata pada masa pandemi COVID-19 di Telaga Ngebel, Kabupaten ponorogo, Provinsi Jawa timur.

2. Metode

Penelitian mengenai *Collaborative Governance dalam pengembangan pariwisata masa pandemic covid 19 di Ponorogo* dalam pengembangan pariwisata pada masa pandemic COVID-19 di Telaga Ngebel dilaksanakan dengan Penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan sebenarnya yang terjadi. Dalam penelitian ini akan tergambarkan dampak pandemi COVID-19.

Pada penelitian ini Penulis *Collaborative Governance dalam pengembangan pariwisata masa pandemic covid 19 di Ponorogo* ditujukan untuk mengetahui kejadian dan kebijakan pemerintah,

khususnya dalam mengembangkan pariwisata di Telaga Ngebel dalam masa pandemi COVID-19. Kegiatan ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dengan mencari sumber-sumber di media sosial. Sehingga tujuan dari kegiatan pun terpenuhi.

3. Hasil dan Pembahasan

Saat ini pandemi COVID-19 sudah rata menjangkau 34 Provinsi di Indonesia. Pada pertengahan Juli 2020, pasien positif di Indonesia sebanyak lebih dari 86.000 dengan lebih dari 4000 orang meninggal dunia. Sementara di Jawa Barat lebih dari 5000 orang terjangkit virus ini dengan pasien yang meninggal sebanyak lebih dari 190 orang

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menekan penyebaran COVID-19 karena telah mengganggu kestabilan segala sektor, mulai dari sektor kesehatan sampai dengan sektor keamanan negara, termasuk dalam sektor pariwisata. Di dalam Undang-Undang No.6 tahun 2018 disebutkan pula bahwa PSBB yaitu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. PSBB merupakan kebijakan pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakatnya. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan bahwa PSBB akan mempengaruhi sektor perekonomian suatu daerah, terutama dalam sektor pariwisata.

Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang menjadi destinasi favorit untuk berwisata. Dengan luas wilayah sekitar 1.372 km², Kabupaten Ponorogo menjadi wilayah dengan berbagai destinasi wisata yang dapat dikunjungi. Terdapat berbagai macam objek wisata yang menarik untuk dikunjungi seperti Telaga Ngebel, terdapat air terjun (widodaren, selorejo), mloko sewu, ngebel adventure park, kampong durian, dan pemandian air hangat .

Kawasan Telaga Ngebel memang menjadi daya tarik wisata di Kabupaten Ponorogo karena menyuguhkan kekayaan alam yang indah sehingga wisatawan yang datang pun terus meningkat, baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri. Daya tarik Telaga Ngebel tidak sebatas pada pesona alam yang beragam, namun terdapat pula pada budaya setempat, serta adanya kampung adat yang menjadi daya tarik sendiri untuk menjelajahi Telaga Ngebel.

Namun peningkatan wisatawan yang terjadi hingga tahun 2020 akan dipastikan menurun akibat adanya pandemi COVID-19. Penurunan jumlah wisatawan yang mengunjungi Telaga Ngebel diakibatkan belum terlihat kondisi yang kondusif apabila mengunjungi tempat wisata, termasuk untuk datang dan menjelajahi Telaga Ngebel. Sebagian orang belum mendapatkan vaksin yang dapat menghambat perkembangan COVID-19 menjadi salah satu alasan bagi wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata, terutama bagi warga negara asing yang ingin berkunjung ke Telaga Ngebel. Penurunan jumlah wisatawan tersebut maka akan berpengaruh ke sektor ekonomi sehingga peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar Telaga Ngebel menjadi terhambat.

Pada sektor pariwisata, pandemi COVID-19 menghentikan segala macam aktivitas pariwisata yang mengakibatkan penurunan tingkat ekonomi masyarakat, khususnya yang berada di sekitar daerah wisata tersebut. Menurut (Herdiana, 2020) terdapat lima aspek di sektor wisata yang terdampak oleh pandemi COVID-19, yaitu sektor ekonomi, dikarenakan berhentinya kegiatan di sektor pariwisata sehingga berpengaruh pada jasa pariwisata, seperti transportasi, penginapan, pemandu wisata, dan lain sebagainya yang tidak mendapatkan pemasukan dana untuk memutar roda usahanya. Kedua, sektor pajak, dikarenakan tidak adanya aktifitas wisata maka akan terjadi penurunan dari target penerimaan pajak sektor pariwisata. Ketiga, sektor tenaga kerja. Pandemi memaksa pemilik usaha untuk menghentikan usahanya karena tidak adanya pendapatan yang diterima sehingga membuat mereka merumahkan para pegawainya karena tidak sanggup untuk memberikan gaji/upah. Keempat, aspek promosi pariwisata. Pandemi menghentikan kegiatan promosi tempat wisata yang pada akhirnya menurunkan pamor dari tempat wisata karena

pemasaran wisata pun tidak berjalan dengan semestinya. Kelima, aspek keberlanjutan usaha pariwisata. Masa pandemi COVID-19 ini belum diketahui kapan akan berakhir, sehingga belum ada kepastian dalam keberlanjutan tempat wisata, apakah akan bertahan atau tidak.

(Kurniawan, 2020) mengatakan, dengan mengutip Windhu Purnomo, ahli Epidemiologi dari Universitas Airlangga, pembatasan pergerakan manusia merupakan satu-satunya cara mencegah penyebaran penyakit akibat COVID-19. Peningkatan jumlah positif COVID-19 karena masyarakat tidak disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan, seperti masih berkumpul lebih dari dua orang, tidak memakai masker, jarang mencuci tangan dan tidak menjaga jarak saat berada di kerumunan.

Diperkirakan protokol kesehatan di tempat wisata akan menjadi salah satu aspek utama yang akan lebih diperhatikan oleh wisatawan dan akan menjadi salah satu program dalam pengembangan pariwisata dalam masa pandemi COVID-19. Menurut Hakim, wisatawan akan semakin waspada dalam merencanakan kegiatan wisata. Apabila di tempat wisata tersebut memiliki tingkat ancaman tertular tinggi, maka akan menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata tersebut. Tujuan dari seseorang melakukan perjalanan wisata adalah untuk menadapatkan pengalaman baru, akan tetapi pada masa pandemi COVID-19 ini seseorang akan berpikir terlebih dahulu dalam melakukan perjalanan wisata karena pandemi COVID-19 akan menjadi ancaman dalam melakukan perjalanan wisata. Hakim menambahkan, terdapat tiga faktor utama yang menjadi indikator wisatawan akan melakukan wisata atau tidak, diantaranya kondisi kehidupan di tempat wisata, tingkat higienitas, dan ketersediaan perawatan medis di tempat wisata (Hakim, 2020).

Menurut (Nugroho, 2019) dalam Komunikasi Bencana, tugas dan tanggung jawab pemerintahan untuk memberikan penerangan, informasi, dan edukasi tentang pelayanan masyarakat mampu meyakinkan masyarakat untuk berpartisipasi melaksanakan program pembangunan dengan semangat kejujuran dan keterbukaan memberikan pelayanan, serta pengabdian. Kunci dari tugas Humas pemerintah adalah sebagai komunikator untuk membantu terlaksananya program pembangunan. Humas pemerintah dalam bertugas memiliki peran ganda yakni bertindak sebagai komunikator bagi penyebaran informasi program pembangunan, sekaligus juga harus mampu menyerap aspirasi masyarakat, serta menyelaraskan dengan kepentingan lembaganya untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam pengembangan pariwisata, pemerintahan tidak akan lepas dari strategi komunikasi, terutama pada masa pandemi COVID-19 seperti ini. Pemerintah perlu ekstra bekerja keras agar tempat wisata dapat terus eksis dan menarik perhatian wisatawan, setidaknya mengetahui bahwa tempat wisata tersebut telah siap menghadapi era *new normal* di masa pandemi COVID-19. Salah satu strategi komunikasi yang dapat dilakukan oleh pemerintahan yaitu dengan memanfaatkan media komunikasi digital untuk dapat menginformasikan tempat wisatanya kepada publik. Pemilihan media komunikasi menjadi salah satu faktor keberhasilan dari strategi komunikasi (Sugiarti, 2016).

(Yusup, 2018) dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa dalam strategi komunikasi diperlukan komunikator yang tepat dan dapat memahami informasi yang akan disampaikan kepada penerima informasi, merencanakan pengemasan pesan yang akan disampaikan, mempersiapkan media komunikasi yang akan digunakan, serta mengetahui dan memahami informasi yang ingin diterima oleh penerima informasi. Strategi komunikasi diperlukan pengetahuan mengenai informasi yang ingin diterima oleh penerima pesan, penyusunan pesan sehingga dapat diterima dan dipahami oleh penerima pesan, metode penyampaian informasi, dan pemilihan media yang akan digunakan untuk penyampaian informasi.

Telaga Ngebel menjadi salah satu ikon di Kabupaten Ponorogo dan menjadi bagian dari kekayaan alam di Jawa Timur. Dalam masa pandemi COVID-19 diperlukan penyampaian informasi yang baik agar Telaga Ngebel dapat beradaptasi dengan keadaan saat pandemi COVID-19 ini. Peran pemerintah diperlukan dalam menyampaikan informasi untuk memulihkan kondisi

pariwisata Telaga Ngebel dan sebagai pengembangan pariwisata Telaga Ngebel paska pandemi COVID-19.

Strategi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan informasi mengenai pencegahan COVID-19 di Telaga Ngebel salah satunya yaitu dengan memasang baliho, poster, maupun spanduk yang berisi ajakan untuk melaksanakan protokol kesehatan bagi masyarakat Telaga Ngebel maupun masyarakat luar wilayah Telaga Ngebel. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dalam membatasi penyebaran pandemi COVID-19 serta sebagai upaya dalam adaptasi era new normal di tempat wisata. Dengan adanya upaya tersebut, masyarakat dan pengunjung yang datang ke Telaga Ngebel akan selalu diingatkan untuk berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan demi kebaikan bersama.

Upaya pengembangan pariwisata di masa pandemi COVID-19, pemerintah memegang peran penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas. Pemerintah perlu memberikan pemahaman mengapa suatu kebijakan perlu dilaksanakan, tujuan kebijakan itu dibuat, serta manfaat dari kebijakan yang telah dibuat untuk masyarakat. Disamping itu, saat ini media komunikasi telah banyak jenisnya, mulai dari televisi, radio, media cetak, sampai dengan media sosial yang telah dipergunakan oleh masyarakat di berbagai lapisan sehingga informasi ataupun kebijakan mengenai pencegahan COVID-19 pun dapat diterima dengan cepat oleh masyarakat.

Pandemi COVID-19 memang menghambat semua kegiatan di daerah tempat wisata, termasuk di Telaga Ngebel, akan tetapi pengembangan pariwisata di Telaga Ngebel tidak harus terhenti. Mempersiapkan sarana protokol kesehatan dalam menekan penyebaran COVID-19 di Telaga Ngebel sangat diperlukan. Selain itu, peraturan wisata di era new normal perlu diperketat, seperti tetap memperhatikan kesehatannya dengan menerapkan 3M (memakai masker dengan benar, mencuci tangan secara rutin, dan menjaga jarak saat berada di kerumunan).

4. Kesimpulan

Pariwisata merupakan salah satu roda utama penggerak ekonomi negara. Saat ini sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang terdampak paling besar oleh pandemi COVID-19. Banyak aspek-aspek di dalam sektor pariwisata yang menjadi korban pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 membuat ketidakstabilan pada aspek ekonomi sehingga memunculkan masalah lain pada sektor pariwisata, diantaranya pemutusan hak kerja oleh pelaku usaha di bidang pariwisata kepada karyawannya, penutupan sejumlah fasilitas penunjang wisata seperti penginapan, hotel, restoran, dan lainnya, serta penurunan jumlah pendapatan daerah. Meskipun begitu, perlu dipersiapkan kebijakan mengenai aturan-aturan dalam menghadapi era new normal dalam masa pandemi maupun setelah pandemi.

Telaga Ngebel merupakan wisata alami yang harus dijaga, dilestarikan, serta dikembangkan keberadaannya. Dalam masa pandemi COVID-19, Telaga Ngebel dapat membuat dan beradaptasi dengan kebijakan yang telah dibuat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pengembangan pariwisata lokal dalam masa pandemi diperlukan agar sektor pariwisata tetap berjalan dan ekonomi dapat terbangun kembali. Pengembangan pariwisata lokal dengan protokol kesehatan akan menjadi kewajiban bagi pemerintah dan pengelola wisata. Protokol kesehatan yang telah di buat oleh pemerintah dalam masa pandemi maupun setelahnya merupakan suatu kewajiban yang harus diikuti oleh pengelola, wisatawan maupun masyarakat di sekitar tempat wisata.

Pemerintah memiliki kewajiban dalam menginformasikan seluruh informasi mengenai pandemi COVID-19 dan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Dalam pengembangan pariwisata di Telaga Ngebel pemerintah telah memiliki kebijakan untuk memetakan hubungan sosio-ekologi di kawasan Telaga Ngebel, mengidentifikasi dampak COVID-19 yang akan terjadi selama pandemi dan paska pandemi, serta melakukan inventarisasi pedoman dan tata kelola Telaga Ngebel di masa new normal. Pemerintah memiliki tugas untuk

menjembatani antara masyarakat dengan lembaga pemerintahan, dapat menampung aspirasi dari masyarakat dan menyampaikannya kepada lembaga atau pemerintah terkait, memberikan informasi yang baik dan dapat dipahami oleh masyarakat.

Peran Pemerintah dalam pengembangan pariwisata Telaga Ngebel dalam masa pandemi COVID-19 diperlukan agar wisatawan tetap mengetahui informasi terbaru dan kesiapan, serta keamanan dari Telaga Ngebel. Saat ini, informasi mengenai keadaan tempat wisata, kebersihan, dan adanya fasilitas kesehatan di tempat wisata akan menjadi pertimbangan untuk wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata. Saat pandemi seperti ini, wisatawan sebagai penerima informasi selalu mencari informasi keamanan dari daerah tempat wisata, sehingga mereka mendapatkan keyakinan untuk pergi berwisata ke tempat tersebut di waktu yang lain. Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun daerah menjadi salah satu poin utama dalam pengembangan pariwisata di Telaga Ngebel dalam masa pandemi COVID-19 saat ini.

Acknowledgment

Terima kasih kami ucapkan kepada pembimbing dan seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Ponorogo atas selesainya artikel kami, karena selama ini telah menasehati, membantu dan mengajari penulis.

References

- Hakim, N. (2020). Wabah dan peringatan perjalanan dalam persepsi wisatawan. *Master Pariwisata* , 31.
- Herdiana. (2020). Rekomendasi kebijakan pemulihan pariwisata pasca wabah corona virus disease 2019 (COVID-19) di Kota Bandung. *Master Pariwisata* , 1-30.
- Kurniawan. (2020). Penerapan kembali psbb, epidemiolog: satu-satunya obat cegah penularan, batasi pergerakan manusia. *Prfmnwes.Pikiran-Rakyat.com* .
- Nugroho, S. &. (2019). Komunikasi bencana: membedah relasi bnpb dengan media. pusat data, informasi dan hubungan masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Sugiarti, A. d. (2016). Strategi komunikasi dinas kebudayaan dan pariwisata dalam pemetaan potensi wisata Kabupaten Buton Tengah. *Ilmu Komunkasi UHO & Kajian Ilmu Komunikasi Informasi* , 1-15.
- Yusup, R. &. (2018). Strategi komunikasi dalam pengembangan desa agro wisata di Kabupaten Pangandaran. *Signal* , 1-13.